

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan TIK (Teknologi, Informasi, Komunikasi) berdampak pada kompleksnya kebutuhan masyarakat utamanya terkait pemenuhan kebutuhan publik karena masyarakat menjadi lebih kritis terkait efektivitas serta efisiensi dari pemberian pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini turut berdampak pada peningkatan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, menyajikan data secara tepat, memberikan referensi yang diperlukan, dan sebagai solusi dalam menangani berbagai permasalahan. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan publik melalui peningkatan pelayanan di bidang TIK atau disebut dengan *E-Government* sebagai bentuk perwujudan dari *good governance* serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Mohi & Botutihe, 2020).

Keberhasilan pengembangan dan penerapan *E-Government* dalam tata kelola pemerintahan Indonesia dinilai berdasarkan teknologi sebagai basis pemberian pelayanan kepada publik karena mampu menangani berbagai persoalan mendasar seperti tenaga, biaya, dan waktu dalam pengelolaannya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang TIK telah tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemantauan, serta evaluasi (Hawa & Valiant Salomo, 2020).

SPBE merupakan bentuk pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menuju *good governance*. Tujuan penerapan SPBE yaitu untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan menjadi lebih transparan, hemat biaya dan waktu, serta efisien dalam menanggapi kebutuhan publik (Hazid, 2022). Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah berlomba lomba mengimplementasikan SPBE melalui berbagai aplikasi untuk memudahkan semua bentuk pelayanan melalui digital. Setiap tahunnya, Kementerian PANRB melaksanakan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan SPBE pada seluruh instansi pemerintah untuk meninjau progres implementasi SPBE serta sebagai indikator pendukung penilaian SAKIP (Sistem Kinerja Instansi Pemerintahan).

Tabel 1.1. Indeks SPBE 10 Pemerintah Provinsi Tertinggi Tahun 2023

No	Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4.26	Memuaskan
2.	Pemerintah Provinsi D.I.Y Yogyakarta	4.22	Memuaskan
3.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4.21	Memuaskan
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4.14	Sangat Baik
5.	Pemerintah Provinsi Bali	4.07	Sangat Baik
6.	Pemerintah Provinsi NTT	3.83	Sangat Baik
7.	Pemerintah Provinsi Lampung	3.81	Sangat Baik
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.75	Sangat Baik
9.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3.62	Sangat Baik
10.	Pemerintah Provinsi Aceh	3.62	Sangat Baik

Sumber: 1data.menpan.go.id

Berdasar pada tabel diatas, indeks SPBE tertinggi diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks sebesar 4,26 dan predikat memuaskan. Capaian ini menghasilkan penghargaan oleh Presiden Joko Widodo yaitu *Digital Government Award* pada acara SPBE Summit tahun 2024. Dikutip dari website *Jateng.prov.id*, indeks SPBE Jawa Tengah terus meningkat sejak tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan data, layanan, serta aplikasi untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.

Kompleksitas kebutuhan akan pelayanan publik berdampak pada permintaan informasi serta data kredibel untuk berbagai kepentingan. Informasi dapat ditemukan dimana saja sebagai dasar untuk mengambil keputusan, menyajikan data, serta memberikan solusi dari sebuah permasalahan. Salah satu sumber mendapatkan informasi tersebut yakni melalui arsip karena arsip memberikan informasi yang lebih kredibel, tepat, dan otentik. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 memaparkan terkait kearsipan, yakni arsip merupakan sebuah rekaman kegiatan maupun peristiwa disajikan dalam media apapun sesuai dengan perkembangan TIK. Arsip memiliki beberapa pengaruh salah satunya terhadap eksistensi organisasi utamanya organisasi publik dalam memberikan informasi terkait perencanaan di masa depan.

Pelayanan ketersediaan arsip telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) yang terpadu, sistemik, dan komprehensif guna menangani tantangan dalam sistem TIK. Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri Nomor 679 Tahun 2020 terkait Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dengan aplikasi yang ditetapkan yakni SRIKANDI. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar acuan pemberian layanan administrasi pemerintahan dengan basis elektronik. Penetapan SRIKANDI sebagai AUBKD bertujuan untuk mendorong pelayanan administrasi pemerintahan utamanya dalam bidang kearsipan dinamis, mewujudkan persamaan dan keterpaduan dalam mengelola arsip dinamis berbasis elektronik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, serta transparan melalui penggunaan aplikasi pendukung SPBE terkait kearsipan dinamis pada seluruh instansi pemerintahan. Pedoman penerapan SRIKANDI sebagai aplikasi kearsipan dinamis juga telah tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

SRIKANDI merupakan sistem informasi berbasis elektronik untuk mewujudkan sistem pemerintahan terintegrasi yang dapat digunakan bagi lembaga negara maupun pemerintah daerah berkaitan dengan kearsipan. SRIKANDI menjadikan seluruh arsip dan surat menyurat dapat terekam di jejak digital dengan efisien sehingga menjadi memori kolektif pendukung SPBE dan membuat pelayanan kepada masyarakat meenjadi lebih mudah. Aplikasi ini memiliki 3 fitur utama yaitu fitur penciptaan arsip, fitur pemeliharaan arsip, dan fitur penggunaan arsip. Fitur penciptaan arsip meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas elektronik antar instansi pemerintah yang terhubung dalam SRIKANDI. Fitur pemeliharaan arsip menjadikan arsip tetap

utuh dan kredibel. Fitur penyusutan arsip meliputi pemindahan serta pemusnahan arsip. Terdapat pula fitur penggunaan arsip bagi yang berhak dan setiap ASN diwajibkan memiliki akun SRIKANDI karena selain untuk arsip dan persuratan, SRIKANDI dapat merekam jejak kinerja ASN.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan aplikasi SRIKANDI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola serta Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pengawas. Implementasi SRIKANDI diwajibkan bagi seluruh instansi pemerintah karena memiliki peranan penting untuk mewujudkan SPBE dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup nasional. Peningkatan *big data* terintegrasi secara nasional pada masing masing instansi daerah menjadi tujuan dari pengimplementasian SRIKANDI dengan harapan seluruh pengiriman naskah, pengarsipan, serta disposisi surat permohonan dapat terintegrasi hanya dalam satu aplikasi.



Gambar 1.1. Tampilan menu login pada SRIKANDI Versi 3

Sumber: SRIKANDI (*arsip.go.id*)

Pedoman penerapan aplikasi SRIKANDI telah diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memudahkan, menertibkan, memastikan, dan mencapai efektivitas penyelenggaraan SRIKANDI pada seluruh instansi pemerintah. Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk menjadikan pekerjaan lebih cepat selesai, peningkatan kinerja dan produktivitas, serta pekerjaan menjadi lebih mudah. Terdapat 3 indikator penerapan SRIKANDI berdasar pada Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 meliputi dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi sumber daya manusia. SRIKANDI juga membutuhkan beberapa aspek pendukung untuk diterapkan seperti sumber daya, tahapan penerapan, dan integrasi dalam SPBE.

Implementasi SRIKANDI telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan dimulai secara bertahap oleh ANRI dengan memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis kepada Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat keputusan maupun surat edaran penggunaan aplikasi SRIKANDI pada setiap instansi pemerintah tanpa terkecuali. Sebagai peraih indeks SPBE tertinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut mengimplementasikan SRIKANDI sebagai aplikasi pengarsipan dan pengiriman naskah sesuai dengan surat edaran nomor 045/0011143 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi dan bimbingan teknis diberikan kepada OPD Provinsi Jawa Tengah sesuai instruksi ANRI melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa

Tengah yang menjadi *leading sector* implementasi SRIKANDI pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Berada dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas penyokong penerapan SPBE atau menjadi *leading sector e-Government* pada tingkat daerah. Hal ini juga berlaku pada implementasi SRIKANDI di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bukan sebagai *leading sector* namun turut andil mendukung penggunaan SRIKANDI bagi instansi lain sebagai bentuk percontohan menerapkan aplikasi guna mewujudkan SPBE. Dikutip dari website diskominfo.jatengprov.go.id, aplikasi SRIKANDI telah diimplementasikan secara bertahap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejak 1 Januari 2024.



Gambar 1.2. Bimbingan Teknis SRIKANDI pada Diskominfo Prov. Jateng

Sumber: diskominfo.jatengprov.go.id

Implementasi SRIKANDI secara terpusat untuk seluruh instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan dan persuratan. Skala kebijakan secara nasional tentu menjadikan pengimplementasian SRIKANDI mengalami berbagai permasalahan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noor, dkk pada tahun 2023 berjudul “Aplikasi SRIKANDI dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat” memaparkan bahwa aplikasi SRIKANDI memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SRIKANDI meliputi percepatan proses pengiriman surat maupun naskah, memiliki fitur baca untuk memudahkan dalam pengontrolan surat, memudahkan monitoring surat dan arsip, serta sebagai pengganti penggunaan kertas. Kekurangan dari SRIKANDI meliputi belum adanya fitur notifikasi sehingga terjadi penumpukan surat, tidak seluruh pegawai instansi memiliki akun SRIKANDI dan memberikan surat secara manual tanpa terdata pada SRIKANDI.

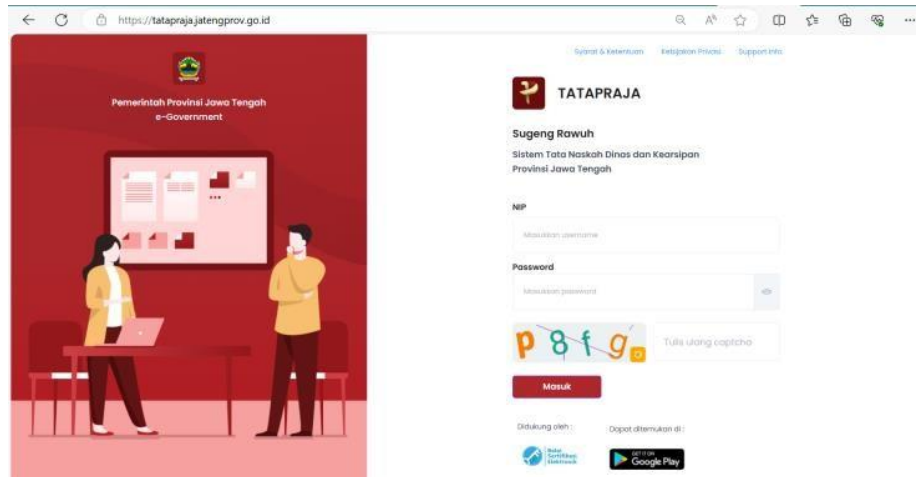
Permasalahan serupa juga dipaparkan pada penelitian terdahulu oleh Dasnoer H. dkk pada tahun 2023 berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Kecamatan Padang Utara Kota Padang” bahwasannya dari teori implementasi menurut Edward III, faktor komunikasi masih terdapat kekurangan karena penyebaran informasi terkait SRIKANDI tidak merata pada satu instansi pemerintah, kurangnya sumber daya pendukung baik manusia maupun non manusia, ASN tidak sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SRIKANDI karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur penggunaan, kendala internal seperti jaringan internet

bermasalah, serta kendala eksternal meliputi belum adanya petunjuk teknis dari *leading sector* Kota Padang. Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi SRIKANDI membantu seluruh proses administrasi persuratan baik dalam lingkup internal maupun eksternal Pemerintah Kota Padang.

Implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan beberapa masalah dan adanya ketidaksesuaian dengan Pedoman Penerapan SRIKANDI. Permasalahan pertama yakni SRIKANDI kerap mengalami *trouble* dari pusat sehingga kegiatan pengarsipan dan persuratan menjadi tertunda. *Trouble* ini menjadikan pegawai harus menunggu perbaikan dengan jangka waktu yang tidak tentu. Aplikasi SRIKANDI telah dikembangkan hingga V3 (Versi 3) dengan perbaikan pada *bug* dan *error* di versi sebelumnya. Kendala *trouble* pada SRIKANDI yang tidak tentu menjadikan pegawai mencari alternatif lain agar tetap dapat mengirim naskah maupun melakukan persuratan. Alternatif tersebut meliputi penggunaan kembali aplikasi TATAPRAJA untuk sementara waktu sampai SRIKANDI dapat digunakan kembali.

Aplikasi TATAPRAJA merupakan aplikasi *e-office* yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan surat, naskah, dan kearsipan dalam satu aplikasi sehingga memudahkan dalam pembuatan, pengiriman, dan arsip pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini telah digunakan sejak tahun 2022 dan beberapa fitur serupa dengan SRIKANDI. Seluruh surat maupun

naskah yang dibuat di TATAPRAJA harus didata kembali pada SRIKANDI agar riwayat pengiriman dan pengarsipan dapat terekam dengan jelas.



Gambar 1.3. Tampilan aplikasi TATAPRAJA

Sumber: *tatapraja.jatengprov.go.id*

Berdasar pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan Ibu Riani Adi selaku Staf Divisi Program, penggunaan TATAPRAJA masih dilakukan sampai sekarang dan dinilai lebih efektif dari SRIKANDI pada awal implementasi SRIKANDI

“Sudah ada aplikasi serupa dalam pengarsipan sebelum diterapkannya SRIKANDI namanya TATAPRAJA yang digunakan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. TATAPRAJA ini udah jadi kebiasaan para pegawai disini jadi pas diterapin SRIKANDI dari pusat ada yang masih enggan gitu pakai SRIKANDI”

Aplikasi TATAPRAJA serupa dengan SRIKANDI dengan tujuan untuk mengintegrasikan segala surat, naskah, dan kearsipan dalam satu aplikasi sehingga memudahkan dalam pembuatan, pengiriman, dan arsip di instansi pemerintahan. Kemajuan teknologi dan kemudahan dalam menggunakannya

sudah seharusnya menjadikan kinerja pegawai menjadi produktif dan banyak memanfaatkan teknologi tersebut.

Permasalahan berikutnya yaitu belum seluruh persuratan maupun naskah terintegrasi dalam SRIKANDI. Beberapa surat masih ada yang dilakukan secara manual baik dalam internal maupun eksternal instansi.

“Untuk surat menyurat masih ada yang dilakukan secara manual bahkan ada kepala bidang yang ngga buka aplikasi SRIKANDI ketika diberikan surat padahal di Kabupaten Kendal itu sudah terintegrasi dalam SRIKANDI dan minim adanya penyuratan manual”

Tabel 1.2 Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar melalui SRIKANDI

NO	JENIS DOKUMEN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Surat Masuk	422	246	332	275	392
2	Surat Keluar	100	66	67	71	84
3	Nota Dinas	39	27	21	17	46
Total		561	339	420	363	522

Sumber : PPID diskominfo provinsi jateng (2024)

as	Unit Kerja	Naskah Masuk	Naskah Keluar	Disposisi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.580	860	0
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.436	583	0
	GUBERNUR JAWA TENGAH	1.125	0	0
	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.088	181	0
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.037	637	0
	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	1.031	293	0
	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	987	329	612
	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	948	296	0
	BIRO HUKUM	901	54	0
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH	898	161	0
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	884	230	0
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH	816	1.399	1
	SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	799	24	315
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	729	439	0

Gambar 1.4. Detail Naskah pada Pemprov Jawa Tengah (2024)

Sumber : SRIKANDI (arsip.go.id)

Berdasarkan data naskah yang dilansir dari website *SRIKANDI (arsip.go.id)*, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah memiliki naskah masuk sebanyak 884 naskah, naskah keluar sebanyak 230 naskah, dan belum memiliki disposisi. Hal ini menunjukkan bahwa surat, naskah, dan pengarsipan belum terintegrasi sepenuhnya dalam aplikasi SRIKANDI karena sistem SRIKANDI yang *error* dan tidak dapat diakses menjadikan pegawai tidak dapat melakukan *input* langsung pada sistem SRIKANDI.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan identifikasi masalah dalam penerapan SRIKANDI maka peneliti akan melakukan analisis dan penelitian yang diberi judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah” untuk melihat implementasi SRIKANDI sebagai aplikasi pendukung SPBE. Teori implementasi menggunakan teori Edward III untuk menganalisis faktor dalam implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis faktor penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini sebagai sebuah kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait Implementasi Kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini sebagai bantuan dalam memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi civitas akademik yang hendak melakukan kajian dengan topik serupa serta turut menjadi penyempurna pada penelitian mendatang terkait implementasi SRIKANDI di instansi pemerintah.

B. Kegunaan praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait fenomena di instansi pemerintahan dan digunakan sebagai bentuk kajian pengembangan teoritis dari ilmu yang dipelajari peneliti selama berkuliah diaplikasikan berupa skripsi sebagai syarat untuk menuntaskan strata 1

2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi maupun bahan rujukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mengevaluasi implementasi SRIKANDI serta terus meningkatkan kinerja maupun komitmen instansi pemerintahan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini mampu informasi, bahan bacaan, maupun rujukan bagi para pembaca, masyarakat, mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti lainnya dengan topik serupa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian terdahulu meliputi kumpulan dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang lain dengan topik serupa. Hal ini menjadi perbandingan dan bahan acuan untuk melakukan penelitian serta menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak plagiasi terhadap penelitian sebelumnya, menjadi kebaruan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada, serta sebagai referensi maupun rujukan untuk penelitian di masa mendatang.

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaaan Penelitian
1.	Harvi Dasnoer, dkk./ (2023)/ Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Padang Utara Kota Padang/ <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i>	Menganalisis penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kecamatan Padang Utara	Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Aplikasi Srikandi di Kecamatan Padang Utara telah diimplementasikan ditinjau dari tiga indikator yakni implementasi, kendala, dan upaya. Penelitian ini menggunakan model implementasi oleh George Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Namun implementasi Srikandi belum berjalan baik dari indikator implementasi.	Relevansi terdapat pada kesamaan fokus penelitian yakni implementasi SRIKANDI pada instansi pemerintah. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian.
2.	Jatmiko, Y., dkk./ (2024)/ Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kota Bengkulu/ <i>Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan</i>	Mendeskripsikan kesiapan penggunaan aplikasi SRIKANDI dan melakukan evaluasi kesiapan implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu	Penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif	SRIKANDI belum berjalan optimal dan belum siap untuk digunakan di seluruh OPD Kota Bengkulu sehingga perlu adanya optimalisasi sumber daya manusia serta sarana prasarana penunjang implementasi kebijakan SRIKANDI. Optimalisasi dapat dilakukan dengan berfokus pada faktor kearsipan meliputi kesesuaian penggunaan sistem penyimpanan, pemenuhan fasilitas sesuai standar, serta memadainya petugas kearsipan sesuai standar	Relevansi meliputi adanya kesamaan objek penelitian aplikasi yaitu aplikasi SRIKANDI. Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan untuk melakukan penelitian.
3.	Tian Nirwana/ 2022/ Analisis Implementasi Kebijakan	Melakukan analisis implementasi	Metode penelitian	Kebijakan penyelenggaraan arsip pada Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian yaitu aplikasi

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Penyelenggaraan Kearsipan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri/ <i>Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan</i>	kebijakan penyelenggaraan kearsipan pada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	dengan pendekatan postpositivis	telah memenuhi hampir seluruh indikator implementasi menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Terdapat beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki seperti kuantitas SDM pengelola arsip, sikap ASN terkait kesadaran dan tanggung jawab pengelolaan arsip, serta pembuatan SOP kearsipan	pengelolaan arsip dan kesamaan teori sebagai bahan analisis yaitu menggunakan teori implementasi George Edward III. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian
4.	Dian Aristriya, dan Tuswoyo/2024/Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI) Sebagai Upaya Mitigasi Kebencanaan	Menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman pegawai terhadap aplikasi SRIKANDI	Metode penelitian kualitatif	Implementasi kebijakan SRIKANDI pada BNPB sudah dijalankan dengan baik ditinjau dari 4 faktor (sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi)	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian yaitu kebijakan SRIKANDI dan kesamaan teori sebagai bahan analisis yaitu teori implementasi Edward III. Perbedaannya yaitu situs penelitian
5.	Bambang Ari Satria/ 2024/ Implementasi Pemerintahan Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mendeskripsikan implementasi SRIKANDI pada Kanwil Kemenag Kepulauan Bangka Belitung	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Implementasi SRIKANDI telah terlaksana dengan baik ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian yaitu SRIKANDI dan kesamaan teori sebagai bahan analisis yaitu teori implementasi Edward III. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
6.	M. Iqbal, dkk./2024/ Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Sekretariat Daerah Kota Bekasi	Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi SRIKANDI pada Dinas Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pedoman penerapan SRIKANDI di sekretariat daerah kota Bekasi	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Implementasi kebijakan pedoman SRIKANDI telah dilaksanakan namun beberapa aspek belum optimal ditinjau berdasar teori implementasi Edward III	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian yaitu kebijakan terkait penerapan SRIKANDI dan kesamaan teori sebagai bahan analisis yaitu teori implementasi George Edward III. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian
7.	Nurhafni, dkk./2025/ Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	Melakukan analisis, identifikasi kendala, serta evaluasi dari penerapan SRIKANDI pada Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	Metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif	Implementasi SRIKANDI pada Kementerian Agama Kota Lhokseumawe mengalami beberapa kendala seperti pemahaman dan keterampilan pegawai yang rendah, kurangnya arahan serta sosialisasi dari pimpinan, sarana prasarana terbatas, dan koordinasi kurang terbentuk antar unit kerja	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian SRIKANDI dan kesamaan teori sebagai bahan analisis yaitu teori implementasi George Edward III. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian
8.	Hadijah, dan Aulia Rahman/2024/ Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Kantor	Menganalisis implementasi SRIKANDI pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten	Metode penelitian kualitatif dengan	Implementasi SRIKANDI pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong telah terimplementasi ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan,	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian yaitu SRIKANDI. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaaan Penelitian
	Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong	Tabalong menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn	pendekatan deskriptif	sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi politik	
9.	Muhamad Suepa /2024/ Pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang	Menganalisis implementasi SRIKANDI pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang berdasar teori keberhasilan inovasi Masak, Mathhew, dan Mask	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implementasi SRIKANDI telah berjalan baik didukung dengan kondisi internal organisasi meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam aplikasi SRIKANDI	Relevansi meliputi kesamaan fokus penelitian yaitu implementasi SRIKANDI. Perbedaannya terdapat pada situs penelitian
10.	Made E.A., dan I Nyoman S./2020/Implementasi Sistem Kearsipan Elektronik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng	Mendesripsikan implementasi sistem kearsipan elektronik di dinas arsip dan perpustakaan daerah kabupaten buleleng	Metode kualitatif deskriptif	Sistem kearsipanelektronik telah disokong dengan perangkat memadai dan hasil sosialisasi berupa sistem kearsipan elektronik. Terdapat kendala dalam implementasi meliputi SDM, fasilitas, dan biaya	Relevansi meliputi kesamaan objek penelitian yakni sistem pengarsipan di instansi pemerintahan. Perbedaannya terdapat pada model penelitian yang digunakan

1.5.1. Administrasi Publik

Administrasi merupakan sebuah bentuk koordinasi antar sumber daya yang erat kaitannya dengan tiga fungsi utama organisasi meliputi pengarahan, manajemen, dan pengawasan (Sahya, 2012). Hal ini turut diuraikan menurut Herbert A. Simon dalam Syafie (2006) bahwa Administrasi juga diartikan sebagai kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Administrasi menurut Sondang P. Siagian dalam Syafie (2006) didefinisikan sebagai pencapaian tujuan oleh dua orang atau lebih melalui pengambilan keputusan.

Pada buku berjudul “Introduction to the Study of Public Administration”, Leonard D White dalam proses umum dalam seluruh usaha kelompok baik pribadi, umum, besar, kecil, militer, maupun sipil. Definisi serupa dipaparkan pula oleh The Liang Gie dalam Suardita (2016:3) bahwa administrasi merupakan seluruh aktivitas penyelenggaraan dalam kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan. Dimock & Dimock dalam Pasolong (2019:3) mendeskripsikan administrasi sebagai bidang dalam disiplin ilmu untuk mempelajari kehendak rakyat kepada pemerintah serta metode melaksanakannya. Administrasi berfokus pada aspek konkrit yang berasal dari metode maupun produser manajemen.

Publik artinya rakyat, orang banyak, maupun umum. Konsep publik dipaparkan oleh H. George Fredericson (1997) yang dibagi menjadi 5 perpektif sebagaimana berikut:

1. Publik diartikan sebagai sebuah kelompok kepentingan dengan perspektif sebagai manifestasi dari lahirnya kepentingan dari interaksi kelompok maupun masyarakat.
2. Publik diartikan sebagai pemilih rasional dengan individu dalam masyarakat yang memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
3. Publik diartikan sebagai perwakilan untuk memberikan suara dari kepentingan masyarakat.
4. Publik diartikan sebagai konsumen dengan lingkup lebih luas sehingga memunculkan tuntutan terhadap pelayanan birokrasi.
5. Publik diartikan sebagai warga negara dengan anggapan bahwa partisipasi itu penting sebagai bentuk kehadiran serta keterlibatan warga dalam proses penyelenggaraan negara.

Administrasi publik didefinisikan sebagai proses koordinasi dan organisasi dari sumber daya maupun personel publik untuk melakukan perumusan, implementasi, serta pengelolaan keputusan untuk berbagai kebijakan (Chandler & Plano dalam Keban, 2004). Administrasi publik sebagai ilmu dan seni untuk mengatur kepentingan publik serta menjadi solusi atas permasalahan publik dalam bidang sumber daya manusia, organisasi, maupun keuangan. Siagian dalam Waluyo (2007) mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan oleh instansi pemerintah.

Administrasi publik dinilai sebagai Administrasi publik dinyatakan sebagai organisasi maupun administrasi untuk mencapai tujuan kenegaraan meliputi seluruh upaya penyediaan pelayanan dan barang publik seluruh upaya penyediaan pelayanan dan barang publik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Kristiadi, 1994). Definisi serupa dinyatakan oleh Harbani Pasolong (2019) bahwa administrasi publik sebagai serangkaian aktivitas untuk menjalankan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik melalui kerjasama antar kelompok maupun lembaga secara efisien dan efektif.

1.5.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan antara perumusan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kebijakan secara efektif (Sujana, 2017). Hal serupa dinyatakan pula oleh Widodo (dalam Sutojo, 2015) bahwa implementasi menjadi proses pencapaian tujuan sesuai yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang mana dalam penyelenggaraannya meliputi berbagai sumber daya (manusia, keuangan, dan kemampuan operasional) oleh pemerintah maupun pihak swasta serta kelompok maupun individu. Implementasi kebijakan sebagai penetapan arah tujuan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan pemerintah (Wibawa dalam Tahir, 2014).

A. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Edward III (dalam Daming dkk, 2021) menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi dalam kebijakan didefinisikan sebagai suatu aktivitas dalam usaha menyampaikan informasi dari *policy maker* kepada penerima kebijakan. Faktor komunikasi menjadi penting dalam setiap implementasi karena erat kaitannya dengan sumber daya dan selalu menghadapi permasalahan terkait hubungan yang dilakukan. Implementasi dianggap berhasil apabila komunikasi yang ada telah memberikan pemahaman pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sebagai bentuk penyampaian sasaran dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga perlu konsistensi dan kejelasan komunikasi dari pihak atas sampai bawah agar tidak ada perbedaan penafsiran, penyampaian informasi yang tepat serta akurat, serta penyampaian mekanisme dan aturan kebijakan untuk pelaksana.

2. Faktor sumber daya (*resources*)

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan ditunjang oleh kualitas serta kuantitas sumber daya yang ada. Apabila sumber daya tersebut memadai maka kebijakan akan berhasil diimplementasikan dan

berlaku pula sebaliknya. Sumber daya pendukung implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana. Sumber daya manusia berupa kemampuan, kompetensi, maupun keahlian pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, perintah, dan instruksi. Dana berupa materiil untuk mendukung operasional kebijakan. Serta sarana prasarana memadai untuk menunjang implementasi kebijakan dalam suatu instansi.

3. Faktor disposisi atau sikap implementor

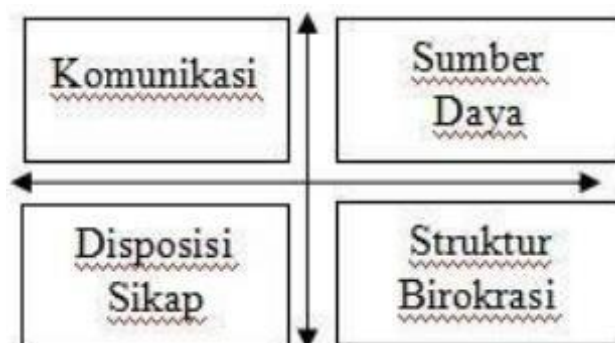
Menurut Edward III (dalam Widodo, 2018) disposisi didefinisikan sebagai suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Sikap implementor ini memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena implementor tidak hanya dituntut untuk mengetahui dan memahami apa yang dikerjakan, namun juga memiliki keinginan dan kemampuan guna melaksanakan kebijakan. Keinginan didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Subarsono (2013:92) menambahkan bahwa disposisi merupakan watak maupun karakteristik oleh pelaksana kebijakan terwujud pada kejujuran, komitmen, serta demokratis karena sikap yang ditujukan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Artinya, jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik dan mendukung kebijakan

maka peluang untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan menjadi lebih besar.

4. Faktor struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Menurut Awang (2010:178) menyatakan bahwa birokrasi merupakan sistem dengan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan penetapan hierarkis bertingkat yang mengatur terkait tugas pokok, fungsi, pola kerja, dan tata nilai dalam sebuah jabatan. Aspek dalam struktur birokrasi meliputi pembagian kewenangan, struktur organisasi yang ditetapkan, serta hubungan antar unit organisasi baik secara internal maupun eksternal untuk melaksanakan kebijakan. Kejelasan struktur birokrasi berdampak pada terperinci pelaksanaan kebijakan dalam sebuah organisasi yang diperincikan dalam pengembangan SOP (*Standard Operating Procedur*). Terdapat dua aspek dalam struktur birokrasi meliputi SOP untuk menyamaratakan aktivitas dan sebagai pedoman teknis dalam birokrasi serta *fragmentation* berupa tekanan maupun hubungan antar unit birokrasi. Peran SOP sebagai penunjang konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tidak ada penyimpangan terhadap aturan.

Gambar 1.5. Model Implementasi Edward III



Sumber : Daming, dkk (2021)

Implementasi kebijakan SRIKANDI perlu dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan yakni diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kearsipan yang berkualitas, keseragaman dalam pengelolaan arsip serta perwujudan *good governance*. Model implementasi ini dipilih sebagai alat analisis yang mampu mengukur permasalahan secara tepat dan merupakan salah satu pendekatan sumber masalah dalam penerapan kebijakan SRIKANDI yang bersifat *top-down*. Selain itu, teori ini berfokus pada pelaksana kebijakan secara internal dan hal ini sesuai dengan keadaan peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap pelaksana kebijakan SRIKANDI yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sehingga dari penggunaan teori ini akan diketahui bagaimana penanganan dari masalah dalam implementasi kebijakan serta mampu memberikan rekomendasi pada hasil akhir penelitian.

B. Model Implementasi Kebijakan Menurut Marilee S. Grinde

Model Merilee S. Grindle (1980) dikenal pula dengan *Political and Administrative Procces* menghendaki adanya variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari proses pencapaian hasil serta tingkat implementasi kebijakan.

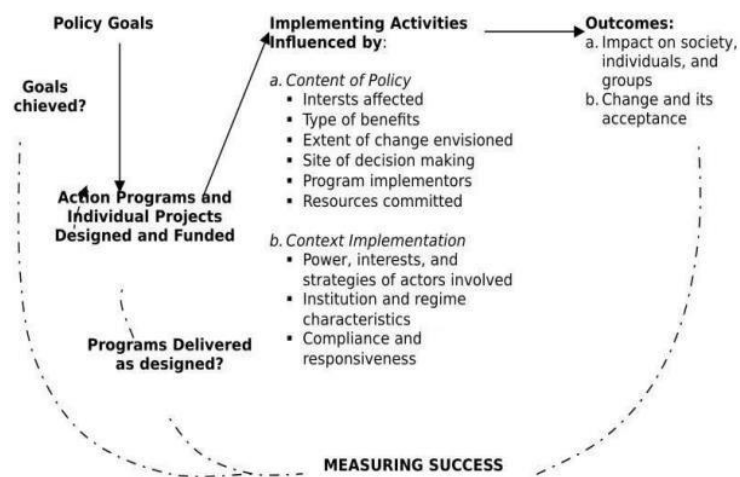
1. Implementasi kebijakan diukur dari proses pencapaian hasil yaitu pencapaian tujuan yang ditentukan meliputi proses (apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan) dan tercapainya tujuan kebijakan dari akibat ke masyarakat serta tingkat perubahan.
2. Implementasi kebijakan diukur dari tingkat implementasii meliputi isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

a. Isi kebijakan

- Kepentingan berpengaruh dari kelompok sasaran
- Tipe manfaat kebijakan berupa dampak positif dari pelaksanaan kebijakan
- Derajat perubahan berupa skala yang jelas untuk dicapai dari kebijakan
- Letak pengambilan keputusan berupa ketepatan program
- Pelaksana yang kompeten untuk menjalankan kebijakan

- Sumber daya pendukung yang dilibatkan harus memadai
- b. Lingkungan implementasi
- Unsur keleluasaan kepentingan dan bagaimana strategi dari aktor yang terlibat
 - Karakteristik lembaga dan penguasa
 - Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan

Gambar 1.6. Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber : Grindle (1980)

C. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono 2021) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Ukuran standar dan sasaran kebijakan publik

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan dapat dilakukan apabila standar dan sasaran kebijakan jelas terukur. Berlaku pula sebaliknya, apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka sulit untuk dilaksanakan karena multiinterpretasi dengan tingginya peluang penyebab konflik.

2. Sumber daya

Kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas dalam memanfaatkan sumberdaya berperan penting sebagai penentuan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut berasal dari sumber daya manusia (*human resources*) dan non manusia (*non-human resources*).

3. Hubungan antar organisasi

Keberhasilan suatu kebijakan harus didukung koordinasi dan komunikasi. Jika koordinasi dan komunikasi terintegrasi antar pihak terlibat telah terlaksana baik maka kesalahan dapat diminimalisir dalam penyelenggaraan kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik terdiri dari struktur birokrasi, watak pelaksana, pola hubungan yang terjadi, serta tingkat kecakapan dan kapabilitas agen pelaksana dalam implementasi kebijakan.

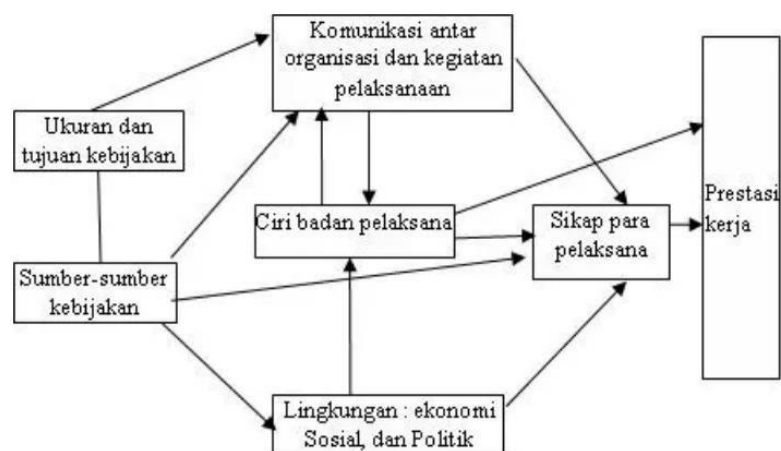
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Kondisi tersebut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dalam pemberian dukungan dari kelompok– kelompok kepentingan untuk meningkatkan tingkat partisipasi kepada publik.

6. Disposisi

Variabel ini terdiri dari respon pelaksana terhadap kebijakan, kognisi atau pemahaman pelaksana terkait kebijakan, dan intensitas disposisi dilihat dari preferensi nilai dari preferensi nilai.

Gambar 1.7. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Carl Van Horn (1975)



Sumber : Subarsono (2021)

D. Model Implementasi Kebijakan menurut Smith

Menurut Smith dalam Islamy (2021:80) terdapat empat variabel berpengaruh dalam implementasi kebijakan meliputi :

1. *Idealized policy*

Perumus kebijakan menggagas adanya pola interaksi dengan tujuan mendorong maupun memberikan pengaruh pada kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan.

2. *Target groups*

Kelompok sasaran termasuk dalam pemangku kepentingan sehingga diharapkan mampu mewujudkan pola interaksi sesuai perumusan kebijakan.

3. *Implementing organization*

Badan pelaksana yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

4. *Environmental factors*

Unsur ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan karena meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

E. Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian

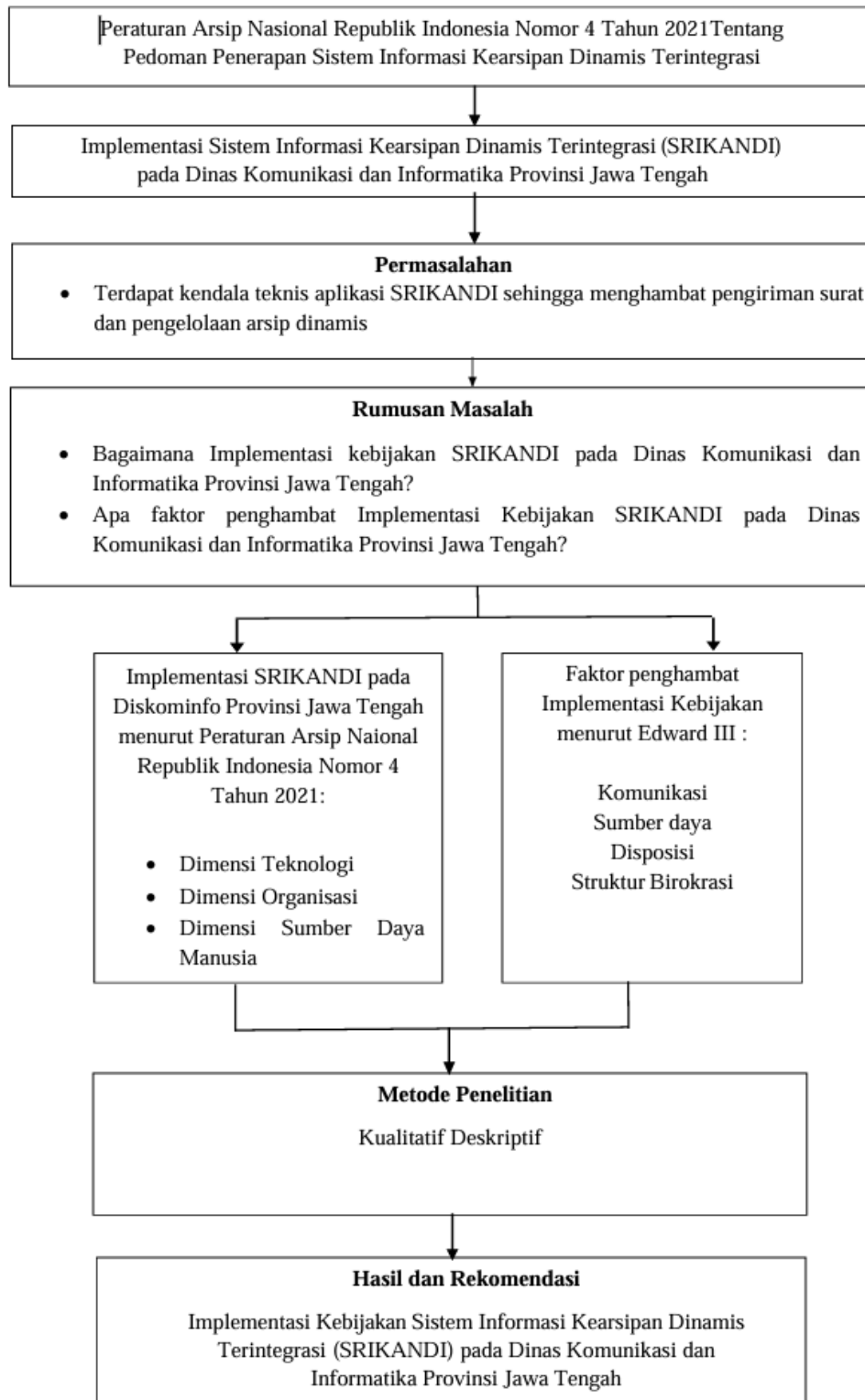
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wicaksono, dkk (2023), model implementasi kebijakan meliputi variabel independen, intervening, luar kebijakan, dan dependen. Variabel tersebut dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Variabel independen, merupakan variabel yang erat kaitannya dengan tingkat kesulitan maupun kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Sub variabel ini terdiri dari kesulitan teknis,

keberagaman perilaku, perbandingan antara populasi dengan kelompok sasaran, dan kehendak dalam perubahan perilaku.

2. Variabel intervening, merupakan kebijakan yang mampu merincikan proses implementasi dalam isi kebijakan yang meliputi konsistensi dan kejelasan tujuan dari pelaksanaan kebijakan, teori kausalitas, pengalokasian dana yang tepat, hirarki antar dan dalam lembaga pelaksana, aturan badan pelaksana, kesempatan antara jabatan dengan tujuan kebijakan, serta akses dari pihak eksternal.
3. Variabel luar kebijakan, merupakan variabel yang berpengaruh terhadap proses implementasi meliputi dukungan publik, sikap serta sumber daya kelompok masyarakat, komitmen keahlian pelaksana, dan aspek sosial, teknologi, dan ekonomi.

1.5.3. Kerangka Berpikir



1.6. Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan setelah melewati perumusan kebijakan dan menjadi tahapan penentu apakah kebijakan tersebut telah sesuai untuk menangani permasalahan yang ada. Implementasi kebijakan SRIKANDI menurut Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 meliputi dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi sumber daya manusia. Faktor implementasi kebijakan menurut teori George Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pegawai.

Tabel I.5 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep	Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan
Implementasi kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menurut Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 Terkait Pedoman Penerapan SRIKANDI	Dimensi Teknologi (aspek pengembangan dalam sistem SRIKANDI meliputi kualitas informasi dan kualitas sistem)	1. Kualitas informasi terdiri dari konten aplikasi yang bersifat personal, relevan, lengkap, aman, dan mudah dimengerti oleh pengguna 2. Kualitas sistem menjadi aspek pelayanan <i>e-government</i> • Kemudahan navigasi bagi pengguna • Ketersediaan aplikasi setiap saat dibutuhkan • Waktu respon SRIKANDI • Keamanan SRIKANDI untuk mengirim naskah

		dinas dan pengelolaan arsip dinamis
	Dimensi Organisasi (dukungan dari internal organisasi untuk mendorong penerapan SRIKANDI diidentifikasi adanya dukungan dari pimpinan dan fasilitasi penerapan SRIKANDI)	1. Dukungan pimpinan merupakan lingkungan kerja yang merefleksikan sikap pimpinan dalam mendorong penggunaan SRIKANDI • Penggunaan sistem dengan memantau tingkat penggunaan SRIKANDI • Evaluasi sistem • Dukungan berupa dana untuk operasional SRIKANDI • Implementasi dengan sikap pimpinan yang mendorong penggunaan dan memberi perhatian pada kinerja SRIKANDI 2. Fasilitasi penerapan SRIKANDI meliputi infrastruktur dan fasilitas teknis mendukung penggunaan sistem • Kemampuan organisasi menyediakan fasilitas penggunaan SRIKANDI • Pemberdayaan akses • Pengetahuan bagi pengguna yang cukup

		untuk menggunakan SRIKANDI • Dukungan memadai berupa adanya staf pembantu
	Dimensi Sumber Daya (aspek sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penerapan SRIKANDI meliputi pelatihan bagi pengguna, kepercayaan individu, dan penerimaan pengguna SRIKANDI)	1. Pelatihan pengguna SRIKANDI yaitu layanan dari instansi untuk mendukung pengguna menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan • Tersedianya pelatihan bagi pengguna SRIKANDI • Dukungan materi latihan dan dukungan IT setelah pelatihan yang memadai • Efektivitas hasil pelatihan 2. Kepercayaan individu dalam kapasitasnya sendiri untuk mempengaruhi perilaku tertentu dalam menggunakan SRIKANDI • Pengalaman diri • Kemampuan diri 3. Penerimaan pengguna SRIKANDI dengan penilaian dari pengguna yang merasakan dampak dari menggunakan SRIKANDI

		• Arsip sebagai memori organisasi • Arsip sebagai alat bukti
Faktor penghambat implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Komunikasi (penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada penerima kebijakan)	1. Koordinasi dengan pihak pihak terkait kebijakan SRIKANDI 2. Kejelasan komunikasi dari pihak atas sampai bawah • Sistem komunikasi yang diterapkan untuk kebijakan SRIKANDI • Kesamaan penafsiran pengguna • Ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan • Ketepatan pihak dalam menyampaikan mekanisme dan aturan pelaksana kebijakan
	Sumber Daya (faktor penunjang implementasi kebijakan ditinjau dari kualitas dan kuantitas sumber daya)	1. Sumber daya pendukung • Kemampuan pegawai menggunakan SRIKANDI • Kompetensi dan keahlian pegawai dalam melaksanakan tugas melalui SRIKANDI 2. Infrastruktur maupun sarana prasarana penunjang

		implementasi kebijakan SRIKANDI
	Disposisi Pegawai/ Sikap Implementor (sikap pelaksana kebijakan berupa keinginan maupun kecenderungan dalam melaksanakan kebijakan)	Keinginan mengimplementasikan SRIKANDI • Pegawai memiliki pengetahuan dasar terkait SRIKANDI dan cara menggunakannya • Pegawai memahami penggunaan SRIKANDI dan mampu mengoperasikannya • Pegawai menggunakan SRIKANDI secara efektif
	Struktur Birokrasi (penetapan pola kerja maupun tata nilai secara hirarkis sesuai tupoksi meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antar unit maupun instansi)	1. Kejelasan struktur organisasi • Terdapat pengembangan SOP atau <i>fragmentation</i> (tekanan dari luar unit birokrasi) 2. Kejelasan pembagian kewenangan bagi pengguna SRIKANDI. 3. Adanya hubungan dan dukungan antar unit instansi maupun antar instansi terkait SRIKANDI

1.7. Argumen Penelitian

Teknologi yang berkembang dengan cepat menuntut pemerintah untuk dapat memanfaatkan teknologi utamanya untuk memberikan pelayanan kepada

publik. Sebagai bentuk perwujudan *good governance*, hampir seluruh OPD berinovasi memberikan pelayanan dengan mudah dalam bentuk aplikasi maupun sistem. Hal ini mendasari penetapan SRIKANDI sebagai aplikasi umum berbasis kearsipan untuk diterapkan di seluruh OPD di Indonesia untuk menuju SPBE sehingga seluruh data, surat, naskah, dan arsip dapat terintegrasi secara nasional dalam satu sistem aplikasi. Peneliti akan melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemaparan latar belakang serta penelitian terdahulu, permasalahan SRIKANDI terdapat pada kendala teknis pada aplikasi yang kerap kali menghambat pengguna untuk memasukkan surat, naskah, maupun melakukan pengarsipan. Peneliti akan melakukan penelitian berdasar pada peraturan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 sebagai pedoman penerapan SRIKANDI di instansi pemerintahan dan menganalisis implementasi berdasar dimensi teknologi, dimensi organisasi, serta dimensi sumber daya manusia. Peneliti juga akan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan SRIKANDI berdasar pada teori implementasi Edward III meliputi sumber daya, disposisi, komunikasi, serta struktur birokrasi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian atau desain yang digunakan peneliti yakni metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur atau cara penelitian dengan hasil data deskriptif meliputi kata kata secara lisan maupun secara

tertulis dari beberapa perilaku orang dan perilakunya terkait dengan fenomena permasalahan. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dan menunjukkan indikasi permasalahan yang ada berupa alamiah ataupun hasil rekayasa dari manusia manusia dengan tetap berfokus pada kualitas, karakteristik, dan kesinambungan antar kegiatan. Penelitian deskriptif kualitatif disebut pula sebagai penelitian secara mendalam yang mengharuskan peneliti langsung dan tidak langsung melakukan pengamatan terkait implementasi kebijakan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan SRIKANDI diimplementasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yaitu lokasi penelitian yang akan dilakukan berdasar pada situasi dan kondisi sebenarnya sebagai dasar pengumpulan data maupun informasi yang menunjang penelitian. Berdasar pemaparan latar belakang, peneliti memilih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai situs penelitian karena sebagai salah satu *leading sector* implementasi SRIKANDI dinas pendukung penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak dengan relevansi maupun kapasitas sesuai dengan topik penelitian serta dipilih melalui teknik *purposive*

sampling atau berdasar kriteria yang ditentukan meliputi pengguna aktif SRIKANDI atau pegawai yang bertanggungjawab atas pengarsipan, pengelola surat maupun naskah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu arsiparis ahli sebagai penanggung jawab kearsipan, tim persuratan dan tata usaha bidang sebagai pengelola surat maupun naskah dinas yang akan dikirim maupun diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

1.8.4. Jenis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif atau serangkaian data yang mampu menjelaskan serta menggambarkan fenomena dan permasalahan secara rinci dan mendalam.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian kualitatif berasal dari perbuatan, tindakan, ucapan, dan selebihnya merupakan data tambahan yang diambil atau dimiliki seorang peneliti seperti foto dokumentasi (Lofland dan Lofland, 1998). Sumber data menjadi subjek dengan memiliki bukti data untuk didapatkan dalam penelitian. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan yang memberikan informasi. Data primer juga mampu

didapatkan melalui observasi objek penelitian maupun wawancara dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan adanya catatan pembahasan mengenai peristiwa maupun kejadian yang telah terjadi berupa laporan, dokumen, literatur, dan bentuk tulisan lainnya.

- a. Laporan, dokumen, dan arsip mengenai implementasi SRIKANDI di instansi pemerintahan.
- b. Informasi dan artikel dari jurnal maupun internet berkaitan dengan aplikasi SRIKANDI dan implementasinya di instansi pemerintahan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi :

1. Wawancara

Wawancara meliputi teknik mengumpulkan informasi dan data melalui proses interaksi dengan informan atau narasumber berupa tanya jawab dan dilakukan secara tatap muka. Pertanyaan yang diajukan kepada informan erat kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara ini menggunakan teknik mendalam dan berdasar pada pedoman wawancara kaitannya dengan fokus masalah penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik mengumpulkan data melalui laporan, berita, surat kabar, transkrip, dan sebagainya. Adanya keterbatasan untuk terjun langsung ke penelitian dapat ditangani dengan studi pustaka untuk melengkapi data dari teknik observasi maupun wawancara.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Pengumpulan data, merupakan proses mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan dan berfokus pada data yang disederhanakan, data berbentuk abstraksi yang berasal dari transformasi big data dan muncul dalam catatan tertulis ketika melakukan pengamatan di lapangan.
3. Penyajian data, merupakan proses penyajian sekumpulan informasi menjadi sistematis kemudian ditarik benang merah serta melakukan tindakan yang sesuai dengan perolehan data. Data mampu disajikan melalui bentuk bagan, grafik, matriks, dan jaringan.
4. Penarikan kesimpulan, berupa jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian namun penarikan kesimpulan ini memungkinkan adanya penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya berupa deskripsi maupun gambar terkait objek yang masih abstrak.

1.8.8. Kualitas Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian disebut sebagai triangulasi. Triangulasi bertujuan untuk menguji validitas atau keabsahan data terhadap penemuannya melalui perbandingan dari beberapa metode maupun sumber teori lainnya. Proses triangulasi meliputi tiga cara yaitu:

1. Triangulasi sumber, merupakan pengujian validitas data melalui pengecekan data yang didapat dari perbedaan sumber.
2. Triangulasi teknik, merupakan pengujian kredibilitas melalui pengecekan data terhadap kesamaan sumber namun menggunakan teknik berbeda. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan Teknik wawancara kemudian mengecek dengan studi kepustakaan.
3. Triangulasi waktu, merupakan pengujian validitas data dengan kesamaan sumber namun berbeda waktunya.

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas data berupa pengujian triangulasi sumber dan triangulasi teknik karena sumber dari informasi atau data tidak hanya berasal dari satu sumber saja namun berasal dari berbagai informan di waktu yang berbeda pula agar data atau informasi tersebut valid dan sesuai dengan fakta permasalahan di lapangan.